

**PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA DI DESA
TANJUNG SIMANDOLAK KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2020**

Fika Sesita, S.IP¹, Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si²

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
Pekanbaru.

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau
28293.

[¹fikasesita2000@gmail.com](mailto:fikasesita2000@gmail.com)

ABSTRACT

Congested Creation Cash village is activities originating from the Village Fund as form effort empowerment public in develop related potential with village and aim for welfare public village. Implementation activity at 20 H soil rice fields owned by managed farmer by BUMDes is starting on year 2017, when this Becomes source power public village Cape Simandolak. If experience failure in the planting process and results harvest so result in public will lost income because most public this only depend on Agriculture as his income.

As for destination from study this is for knowing implement activity congested creation cash village in village Cape The sourced Simandolak from the Village Fund year 2020. Besides that also for knowing factor blocker inside Implementation activity congested creation cash village in village Cape Simandolak. Study this use method qualitative that describes the data in a descriptive. Next technique data collection used is interview and documentation. Whereas data source used is the primary data obtained from location study in the form of informant study and supported by secondary data that is documents related with method interviews, observations , and studies document . As for location study this that is Service Agriculture districts Kuantan Singingi and village Cape Simandolak.

As for results and discussion from study this that is show that implementation activity Congested creation cash village in village Cape Simandolak 2020 is not yet done with maximum. Frequent problems occurs in the agricultural process like less PPL responsive when occur season drought , flood and attack pests. Implementation program activity Congested creation cash villages that use fund village in implementation as well as organization executor in accordance with ability each actors involved then group intended target for public farmer in the village Cape Simandolak that alone. As for factor blocker that is about budget , lack socialization knowledge and skills , still lack of connection communication with Service Agriculture about help. Final existence destination together in implementation activity congested creation cash village in Village Cape Simandolak so that the community future could independent.

Keywords: *Implementation, Solid Creation Cash Village (PKTD)*

ABSTRAK

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan yang berasal dari Dana Desa sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi-potensi yang berkaitan dengan desa dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pada 20 H tanah persawahan milik petani yang dikelola oleh BUMDes di mulai pada tahun 2017, saat ini menjadi sumber daya masyarakat desa Tanjung Simandolak. Jika mengalami kegagalan pada proses tanam dan hasil panen maka mengakibatkan masyarakat akan kehilangan pendapatannya karena kebanyakan masyarakat ini hanya mengandalkan pertanian sebagai penghasilannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa di desa Tanjung Simandolak yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020. Selain itu juga untuk mengetahui faktor penghambat di dalam Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa di desa Tanjung Simandolak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa informan penelitian dan di dukung oleh data sekunder yaitu dokumen-dokumen terkait dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dan Desa Tanjung Simandolak.

Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Padat karya tunai desa di desa Tanjung Simandolak Tahun 2020 belum terlaksana dengan maksimal. Masalah yang sering terjadi di dalam proses pertanian seperti PPL yang kurang tanggap ketika terjadi musim kemarau, banjir dan serangan hama. Program pelaksanaan kegiatan Padat karya tunai desa yang menggunakan dana desa dalam pelaksanaannya serta organisai pelaksana sesuai dengan kemampuan masing-masing aktor yang terlibat kemudian kelompok sasaran yang ditujukan bagi masyarakat tani di desa Tanjung Simandolak itu sendiri. Adapun faktor penghambat yaitu mengenai anggaran, kurangnya sosialisasi pengetahuan dan keterampilan, masih kurangnya hubungan komunikasi dengan Dinas Pertanian mengenai bantuan. Terakhir adanya tujuan bersama dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa di Desa Tanjung Simandolak agar masyarakat kedepannya dapat mandiri.

Kata kunci: Pelaksanaan, Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam suatu negara pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan tentunya harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan dilakukan melalui proses yang terencana dan mencakup segala aspek kehidupan. Pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang tepat dan berkeadilan untuk menjamin warganya berada dalam taraf hidup layak dan menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera (Rumsari Hadi Sumarto, 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)..

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI tahun 2015 menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa cukup fenomenal untuk sebuah program atau kebijakan yang baru. Data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah selama tiga tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 127,75 T.

Pertanian merupakan karakteristik utama dari perekonomian di pedesaan. Pertanian adalah sektor yang banyak dihuni masyarakat perdesaan dinegara berkembang (CIDA,2003).

Padat Karya Tunai di Desa (PKT Desa) merupakan sebuah program pemberdayaan keluarga miskin,

pengangguran, dan keluaraga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pe manfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi local dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Adapun sifat kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa adalah:

1. Kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan mandiri oleh desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak lain.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan materil lokal desa yang berasal dari desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan produktifitas masyarakat desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung, harian atau mingguan.

Desa Tanjung Simandolak merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan jumlah penduduk 504 dimana laki-laki berjumlah 256 orang dan perempuan 248 orang. Desa Tanjung Simandolak adalah hasil pemekaran Kenegrian Simandolak (1976), dengan luas wilayah 121 Ha yang mana batas wilayah sebelah utara terdapat desa Batang Kuantan/Simandolak, sebelah Timur Desa Pulau Kalimantan, sebelah Selatan Desa Batang Kuantan/Desa Pulau Lancang, sebelah Barat Desa Tebing Tinggi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas terkait permasalahan yang ada mengenai Kolaborasi Pemerintah dalam

Pelaksanaan Pola Padat Karya Tunai di desa Tanjung Simandolak, maka penulis melihat ada beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai ?
2. Apa faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai?

3. Kerangka Teori

a. Teori Implementasi Program

Gordon memberikan definisi bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Pasalong, 2007). Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan (Winarno, 2016).

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu (Suryana, 2009):

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David

b. Konsep Padat Karya Tunai

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Padat Karya Tunai (*Cash For Work*). Dari program Padat Karya Tunai, Pemerintah pun telah menetapkan kebijakan pengubahan untuk program padat karya tunai sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tahun 2017 (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) tentang Penyelarasan dan Penguatan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa wajib memenuhi 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa, dimana besaran upah ditentukan dengan musyawarah Perencanaan Pembangunan.

4. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan dengan

pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif biasanya disebut juga dengan metode penelitian *naturalistic*, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga dengan metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif serta Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen untuk mengetahui tentang desa

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Karena kawasan ini sebagai lokasi sekaligus objek penelitian yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan padat karya tunai demi mensejahterakan masyarakat yang berperan sebagai petani. Alasan menetapkan kawasan ini sebagai lokasi sekaligus objek penelitian adalah karena Desa Tanjung Simandolak sudah lama melaksanakan program tersebut dan juga berbeda dengan program desa lainnya kecuali Koto Simandolak.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa di desa Tanjung Simandolak. Diperlukannya implementasi, tujuan implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah

1. Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai

Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang, tentang Pengertian Pemerintah Desa, nomor 6 Tahun 2014).

Petani sebagai sosok individu memiliki karakteristik tersendiri secara individu yang dapat dilihat dari perilaku yang Nampak dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Undang-undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (Undang-undang, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani , Nomor 19 Tahun 2013).

Maksud dan tujuan pelaksanaan program padat karya tunai adalah penciptaan lapangan pekerjaan melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai untuk memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa.

Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa di desa Tanjung Simandolak sangat memerlukan peran aktif dari setiap komponen, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, karna setiap organisasi pasti merancang dan melakukan upaya maupun strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Seperti yang tercantum dalam visi desa

Tanjung Simandolak yaitu “mewujudkan desa Tanjung Simandolak yang maju”. Dalam hal ini tentunya desa Tanjung Simandolak ingin menjadi desa panutan dan unggul dibandingkan desa lain.

Padat Karya Tunai Desa menjadi salah satu instrument dalam pengurangan kemiskinan, pengangguran dll. Sumber dana Padat Karya Tunai Desa sendiri adalah dari dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan di upayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pada tahun 2017 desa Tanjung Simandolak memulai pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa. Dimana desa ini adalah desa yang pertama kali melaksanakan kegiatan tersebut sehingga menjadi panutan bagi desa lainnya. Pemerintah Desa memanfaatkan Dana Desa TA. 2016 untuk melakukan Normalisasi Lahan Persawahan, dari awalnya hanya 5 Ha yang bisa tergarap menjadi 20 Ha. Membuat tembok penahan tanah, sehingga mempermudah akses pada lahan pertanian. Kemudian Pemdes dan Poktan mendapatkan sumur Bor Artesis sebagai sumber air persawahan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi di Tahun 2017.

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi masalah pada pertanian adalah musim kemarau dan genangan banjir. Kemudian terdapat keluhan petani yang terkendala oleh

dana untuk melakukan proses pertanian sehingga untuk meminta bantuan kepada dinas pertanian harus membuat proposal terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan yang dikeluarkan oleh dinas pertanian tersebut.

Keadaan ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas keluarga dan masyarakat untuk menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang selanjutnya membuat kondisi sosial ekonomi keluarga dan masyarakat semakin rendah, demikian seterusnya berputar sebagai suatu siklus yang tidak berujung.

a. Elemen Program

Pada elemen pertama, kesesuaian program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran adalah faktor penting pertama bagi Korten. Keselarasan program dengan kebutuhan sasaran program mutlak dikedepankan karena berpengaruh secara langsung terhadap kebermanfaatan yang akan diperoleh oleh sasaran program. Apabila program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka dapat dipastikan bahwa hasil program tidak memberikan manfaat dan tidak memberdayakan masyarakat.

Untuk mengetahui suatu program itu sudah baik, harus memuat beberapa aspek diantaranya :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan

Pelaksanaan kegiatan Padat karya tunai desa tentu tidak terlepas dari kemampuan dan kesepakatan dari berbagai aparat pemerintah dengan berbagai perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaannya agar tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Tahun	Uraian	Anggaran
2017	1. Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Produk Unggulan Desa	180,000,000
	2. Pengembangan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20,000,000
	3. Penyusunan Rancangan Perdes Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes	3,185,000
	4. Pengembangan Kapasitas BPD	10,000,000
2018	1. Pengembangan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20,900,000
	2. Pengembangan Kapasitas BPD	9,700,000
	3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perempuan	6,750,000
	4. Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Produk Unggulan Desa	182,720,000
2019	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	113,600,000
	2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10,700,000
	3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10,700,000
	4. Peningkatan Kapasitas BPD	10,700,000
2020	1. Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Produk Unggulan Desa	182,000,000
	2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	
	3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	
	4. Peningkatan Kapasitas BPD	10,000,000
	5. Penanggulangan Bencana Banjir	37,200,000

Maksud dan tujuan pelaksanaan program padat karya tunai adalah penciptaan lapangan pekerjaan melalui kegiatan pembangunan secara

swakelola dan padat karya tunai untuk memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa.

Penentuan tujuan yang dimaksud disini adalah menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan.

Peranan pemerintah desa yang bekerjasama dengan petani serta di dorong oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai dapat dilihat dari adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah seperti memberikan bantuan berupa pupuk, bibit, pestisida dll.

2. Adanya anggaran program yang dibutuhkan

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan dana atau modal atas kegiatan atau program agar menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan efektif. Anggaran merupakan bentuk fiskaal yang berarti pendanaan suatu program yang dilaksanakan sehingga pelaksanaan program tersebut terlaksana dengan pencapaian yang ditargetkan.

Adapun jumlah anggaran kegiatan APBDes tahun 2017-2020 dalam pelaksanaan kegiatan padat

karya tunai di desa Tanjung Simandolak dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Sumber: Arsip Kantor Desa Tanjung Simandolak Kec. Benai Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya terdapat data anggaran yang diberikan pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 oleh pemerintah desa dimana pada Tahun 2017 terdapat Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Produk Unggulan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 180,000,000. Selanjutnya Tahun 2018 sebesar 182,720,000, Tahun 2019 yaitu anggran sebesar Rp. 113,600,000. Dan terakhir pada Tahun 2020 Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Produk Unggulan Desa sebesar Rp. 182,000,000. Disini dapat kita lihat bahwa perbedaan anggaran setiap tahunnya berbeda akan tetapi disini pada Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2020 hanya terdapat sedikit perbedaan dimana pada tahun 2017, 2018, dan 2019 anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 180,000,000 sedangkan tahun 2019 sekitar 113,600.000 akan tetapi pada tahun 2020 juga terdapat bantuan mengenai penanggulangan bencana banjir yaitu sekitar Rp. 37,200,000 Jadi anggaran yang akan diberikan pemerintah desa maupun daerah harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing disetiap tahun nya. Berbeda dengan bantuan se-prodi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian.

3. Adanya Strategi yang digunakan

Pada strategi ini Desa Tanjung Simandolak telah menetapkan strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, adapun strategi yang digunakan, yaitu :

- a) Memanfaatkan anggaran dana desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat agar memiliki kompetensi.
- b) Memanfaatkan tenaga pendamping desa dalam

meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat desa.

Dari petunjuk teknis tersebut terlihat maksud dari Pelaksanaan kegiatan Padat karya tunai desa yakni untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal.

Strategi kegiatan petani demikian, menjadi hal yang urgen tetapi kegiatan ini berjalan belum maksimal karena:

- a) Ada sebagian kecil masyarakat desa yang tidak memiliki lahan yang cukup
- b) Konteks pendampingan yang belum maksimal terutama dalam memberi pemahaman
- c) Kurangnya hubungan koordinasi didalam pelaksanaan kegiatan

Penyuluh sebagai pengevaluasi dan pemantauan telah melakukan tugasnya dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai terhadap para petani, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal dikarenakan sering terjadinya keterlambatan dalam proses pengecekan ke lapangan, kurangnya interaksi komunikasi secara langsung pada kelompok tani.

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain. Adanya kegiatan Padat Karya Tunai, menumbuhkan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja bagi keluarga miskin, pengangguran, dll. Padat Karya Tunai menggunakan dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia di desa. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar itu satu elemen yang ditetapkan David C.Korten dalam

elemen program sudah terpenuhi karena adanya perencanaan yang baik dan matang serta kebijakan dalam upaya memecahkan masalah yang hendak diselesaikan.

b. Elemen Organisasi Pelaksana

Pada elemen kedua, Korten menekankan kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Artinya, kesesuaian antara tugas yang dibebankan dengan kemampuan organisasi pelaksana harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan program dengan tepat. Hal ini bisa berakibat pada tidak tersampainya program dengan tepat dan bisa berakibat pada tidak tersampainya manfaat program yang mempengaruhi tujuan program yang dicita-citakan.

Dalam pembuatan kebijakan salah satu hal yang penting adalah Implementatornya, maka dalam melaksanakan suatu kebijakan harus jelas di sebut para aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sasaran dari Padat Karya Tunai Desa adalah desa-desa di seluruh Indonesia dengan menggunakan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi di desa. Dengan demikian pelaksanaan dari Padat Karya Tunai adalah Pemerintah Desa dengan dorongan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah.

1. Disposisi

Disposisi merupakan pendapat dan sikap seseorang mengenai urusan kebijakan pada yang bersangkutan berarti disposisi diartikan sebagai suatu perintah atau instruksi dari atasan atau pimpinan kepada bawahannya atau juga

dari pejabat eselon yang lebih tinggi kejabatan eselon yang terendah.

Pelaksanaan Kegiatan PKT Dana Desa bersifat swakelola dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PKT Dana Desa mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari warga Desa setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga Desa yang terlibat di kegiatan tersebut.

2. Pengaturan Birokrasi

Pelaksanaan suatu program akan berhasil apabila dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Aspek ini memiliki 2 hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri yang pertama mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP), yang kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemah pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Peraturan yang dapat menjadikan pedoman dalam proses kegiatannya. Berbagai prosedur dan protokol serta struktur dalam pelaksanaan dibutuhkan untuk manajemen interaksi antar aktor. Sering kali kesepakatan yang ada dalam pelaksanaan awalnya adalah informal, namun seiring berjalannya waktu, maka dibutuhkan formalitas, seperti adanya pembentukan perundangan atau legal formal yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Kognisi (Pemahaman dan Pengetahuan)

Masalah masyarakat di Indonesia umumnya disebabkan karena rendahnya tingkat sosial ekonomi, yang mengakibatkan ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam berbagai hal, khususnya dalam memelihara diri mereka sendiri (self-care). Bila keadaan ini dibiarkan maka akan menyebabkan masalah yang meningkat terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat. Kegagalan yang sering terjadi dalam proses implementasi program adalah pelaksana yang tidak memadai, mencukupi, ataupun yang berkompeten dibidangnya serta perlu adanya kemampuan dan keahlian dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai memerlukan pelaksana yang memiliki kemampuan dan keahliannya dibidang masing-masing untuk mencapai keberhasilan tujuan.

c. Elemen Kelompok Sasaran

Pada Elemen ketiga Korten menekankan pada elemen kelompok sasaran program dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk sasaran program. Jika tujuan yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka otomatis kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program. Karena itu, elemen ini harus bersinergi satu sama lain agar antara pelaksana dan sasaran program sama-sama mendapatkan manfaat.

Menentukan ketepatan target merupakan prinsip pokok dalam implementasi yang efektif. Serta tersedianya kebutuhan dan potensi desa sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ketepatan memilih target atau sasaran program berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan tidak saling tumpang tindih. Kedua, target dalam kondisi siap untuk diintervensi. Ketiga, implementasi program bersifat baru atau memperbaharui implementasi program sebelumnya demi tidak mengulang program yang lama.

Adapun karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan

pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;

4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Pada Elemen ketiga implementasi yang efektif dilihat dari ketepatan memilih target sudah terlaksana, namun dalam pelaksanaannya kegiatan mengenai prosesnya masih terdapat berbagai masalah dilingkungan masyarakat. Akan tetapi antusias dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan sudah dirasakan oleh masyarakat yang terlibat. Untuk itu, diperlukannya lagi sosialisasi kegiatan yang lebih mendalam kepada masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai

Dalam menjalankan proses implementasi kebijakan baik berupa program maupun kegiatan seringkali mengalami distorsi, sehingga kebijakan tersebut memberikan dampak kegagalan suatu kebijakan politik dalam mengimplementasikan program dan kebijakan. Atas dasar itu maka diperlukan sebuah model implementasi kebijakan publik yang harus dari serangkaian input, proses dan output yang terencana dan berkesinambungan.

Tahapan implementasi pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa di desa, dilaksanakan melalui 5 tahapan yaitu: tahapan persiapan penggunaan dana desa, tahapan perencanaan penggunaan dana desa, pelaksanaan penggunaan dana desa untuk Padat

Karya Tunai, tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Padat Karya Tunai, serta tahapan pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai berjalan dengan baik, namun ada beberapa penghambat yang terdapat dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat saja, namun juga dari pihak pemerintah. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa biasanya muncul pada tahap perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dikatakan hubungan komunikasi masih tergolong kurang dalam menunjang pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa tanjung simandolak akan tetapi dalam proses kinerjanya sudah melibatkan aktor yang berkepentingan untuk turut berpartisipasi secara langsung.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan penelitian pada bab III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan Padat karya tunai desa di desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan maksimal. Diilihat dari sisi masih kurangnya hubungan komunikasi terutama masih terdapatnya keterlambatan bantuan se prodi oleh Dinas Pertanian, kurang tanggapnya PPL dalam pengontrolan lahan petani pada musim kemarau, banjir, dan serangan hama serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tani.
2. Program pada kegiatan Padat karya tunai desa merupakan salah satu program prioritas dana desa yang diwujudkan dalam kegiatan Padat karya tunai desa dengan tujuan

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tani serta dilaksanakan dengan berbagai strategi contohnya pemerintah desa melaksanakan studi banding ke daerah lain.

3. Pelaksanaan program pada Pelaksanaan kegiatan Padat karya tunai desa ini tentunya di dukung prosedur untuk mencapai tujuannya yaitu dengan melihat kemampuan salah satunya disposisi dan kesesuaian lainnya yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaannya.
4. Kelompok sasaran dalam Pelaksanaan kegiatan Padat karya tunai desa ini di tujukan pada masyarakat tani desa Tanjung Simandolak khususnya masyarakat kurang mampu agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kedepannya diharapkan agar dapat melaksanakan kegiatan ini secara mandiri.
5. Faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan kegiatan Padat karya tunai di desa Tanjung Simandolak, yaitu: adanya keterbatasan dana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta hubungan komunikasi antar pemerintah yang masih kurang.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang kolaborasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pola padat karya tunai di desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, menyarankan:

1. Bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa agar dapat menjalin komunikasi yang lebih baik lagi agar dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik dalam program

padat karya tunai tersebut dan mengenai bantuan yang datang oleh Dinas Pertanian diharapkan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan agar pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa berjalan dengan lancar.

2. Bagi masyarakat agar lebih berkomunikasi dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah agar terjalinnya hubungan kerjasama yang baik didalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai ini.
3. Bagi PPL agar lebih aktif lagi dalam melakukan pengontrolan kepada lahan petani padi masyarakat desa.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan dan diharapkan untuk lebih memberi kontribusi yang lebih baik lagi dari penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Maryono. (2010). *Menakar Kebijakan RSBI : Analisis kritis Studi Implementasi* Yogyakarta : Magnum Pustaka
- Pasalong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Praktek)*. Pekanbaru: Graha Unri Press.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi*

Analisis Kebijakan Publik.
Malang: Bayu Media.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service)

B.Skripsi dan Jurnal

Emelda, A. F. (2019). *Skripsi Pelaksanaan Kegiatan Program Padat Karya Tunai Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Dalam Memanfaatkan Dana Bantuan Desa Di Kota Pariaman*.

Sarah, A. (2017). Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan. *Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah*, 29.

Herdiyana, D. (2019). Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin Di Pedesaan Provinsi Lampung Dan Riau. *Skripsi Pendidikan dan Ekonomi*, 16(2).

Riharjo, I. B., & Priyadi, M. P. (2020). Akuntabilitas Padat Karya Tunai Desa (studi kasus di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(8).

Roni Ritonga Manembu, Albert W.S Kusen, & Djefry Deeng . (2019). Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Holistik*, Vol 2, No.2.

Rumsari Hadi Sumarto, L. D. (2019). Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal Publicuho*, 2(2), 65-74.

Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Inovasi Kebijakan*, 4(1).

Suryana, S.E. (2009) Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. 33.

Tarigan, H.A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya. *Kebijakan Publik*, 12.

C.Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015.

PermendesPDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.

D.Internet

<https://mediakeuangan.kemenkau.go.id/>

<http://www.kuansing.go.id>

www.riaumandiri.co